



SUMBER BERITA

JUM'AT, 18 JANUARI 2019

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

4 Kontraktor Nakal Belum Diblacklist

ARGA MAKMUR, BE - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkulu Utara (BU) tidak juga memberikan sanksi kepada kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang sudah ditandatangani.

Buktinya, hingga saat ini ada 4 kontraktor nakal tidak diblacklist, padahal keempatnya sudah terbukti gagal menyelesaikan pekerjaannya 2017 lalu.

Semestinya keempat kontraktor tersebut masuk ke dalam daftar blacklist/daftar hitam yang diumumkan melalui situs resmi LKPP Inaproc.go.id.

Salah satu contoh proyek yang tidak selesai adalah pembangunan bendungan di Desa Sengkuang, Kecamatan TAP, dan ada lagi beberapa paket proyek yang lainnya.

Kepala Dinas PUPR BU, Heru Susanto, ST saat diminta keterangan terkait hal ini, tidak merespon.

Inspektur Daerah BU, Dullah SE mengaku memang ada 4 perusahaan jasa konstruksi pada tahun 2017 lalu yang tidak dapat menyelesaikan kontrak kerjanya.

"Data itu ada dengan kita, ada sebanyak 4 perusahaan yang putus kontrak tahun 2017," ungkapnya.

Namun, saat diminta nama-nama perusahaan konstruksi tersebut, Dullah enggan memberikannya.

"Untuk nama-nama perusahaannya tidak bisa kita berikan, hal ini sebaiknya ditanyakan langsung oleh OPD terkait," ujar Dullah.

Lanjut Dullah, secara teknis untuk penyanggan daftar perusahaan yang putus kontrak adalah Dinas PUPR BU.

"Kalau secara aturannya memang itu mesti ditayangkan, berarti wajib untuk ditayangkan daftar perusahaan-perusahaan yang putus kontrak ini," imbuh Dullah.

Lebih lanjut Dullah menyampaikan bahwa apabila 4 perusahaan yang diblacklist ini belum masuk ke daftar blacklist/daftar hitam di LKPP, Inspektorat BU tidak mengetahuinya, karena bukan ranah Inspektorat.

"Soal penyanggan blakslit bukan ranah kita, yang jelas kalau data nama-nama tersebut ada dengan kita, sebaiknya langsung saja temui OPD terkait," tandasnya. (127)